



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 350);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 13 Seri A);

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.823.872.375.449,99
b.	Belanja dan transfer	<u>Rp. 1.773.100.723.747,51</u>
c.	Surplus (a-b)	Rp. 50.771.651.702,48
d.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 115.669.724.111,19
e.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>RP. 0,00</u>
f.	Pembiayaan Netto (d-e)	Rp. 115.669.724.111,19
g.	(Silpa) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (c + f)	Rp. 166.441.375.813.67

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan anggaran mencapai 101,82 % dengan rincian sebagai berikut:
 1. Realisasi pendapatan Rp. 1.823.872.375.449,99
 2. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.791.355.578.238,00
- b. Realisasi Belanja dan Transfer dibandingkan dengan anggaran mencapai 92,97% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Belanja dan Transfer Rp. 1.773.100.723.747,51
 2. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp. 1.907.257.677.720,00
- c. Realisasi Surplus/defisit dibandingkan dengan anggaran mencapai (43,81%) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Surplus/defisit Rp 50.771.651.702,48
 2. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (115.902.099.482,00)
- d. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dibandingkan dengan anggaran mencapai 99,80% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 115.669.724.111,19
 2. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 115.902.099.482,00
- e. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibandingkan dengan anggaran mencapai 0,00% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
 2. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Realisasi Pembiayaan Neto dibandingkan dengan anggaran mencapai 99,80% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Pembiayaan Neto Rp. 115.669.724.111,19
 2. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 115.902.099.482,00
- g. Sisa Lebih / kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 166.441.375.813.67

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.115.726.688.664,34
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.115.666.569.569,19</u>
Sub total (a-b)	Rp. 60.119.095,15
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	Rp.166.441.375.813.67
Sub Total (b+c)	Rp.166.501.494.908,82
d. Koreksi Lain-lain	<u>Rp. (60.119.095,15)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d)	Rp.166.441.375.813,67

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan- LO	Rp.1.931.598.199.061,86
b. Jumlah Beban	<u>Rp.1.653.785.820.040,93</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi (a-b)	Rp. 277.812.379.020,93
d. Beban Luar Biasa	<u>Rp. 0,00</u>
e. Surplus/Defisit LO (c-d)	Rp. 277.812.379.020,93

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp. 3.800.016.554.555,36
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 277.815.533.562,93
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	
1. Koreksi Ekuitas Aset Tetap	Rp. 0,00
2. Koreksi Ekuitas lainnya	<u>Rp. 11.297.964.256,32</u>
d. Ekuitas Akhir (a+b+c)	Rp. 4.089.130.052.374,61

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 4.181.047.596.384,61
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 91.917.544.010,00</u>
c. Jumlah Ekuitas (a-b)	Rp. 4.089.130.052.374,61

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 rinciannya sebagai berikut:

a. Aset lancar	Rp. 271.963.583.950,60
b. Investasi jangka Panjang	Rp. 188.176.215.192,42
c. Aset Tetap	Rp. 3.425.556.471.469,55
d. Properti Investasi	Rp. 14.249.091.461,01
e. Aset lainnya	<u>Rp. 281.102.234.311,03</u>
Jumlah Aset (a+b+c+d+e)	Rp. 4.181.047.596.384,61

f. Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 91.917.544.010,00
g. Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Kewajiban (e+f)	Rp 91.917.544.010,00
h. Ekuitas	<u>Rp. 4.089.130.052.374,61</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 4.181.047.596.384,61

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 402.744.875.331,48
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (351.973.223.629,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 3.154.542,00
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	<u>Rp. 33.574.871,00</u>
e. Kenaikan/(Penurunan) bersih selama Periode (a+b+c+d)	Rp. 50.808.381.115,48
f. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari Tahun 2024	Rp. 115.851.580.493.34
g. Koreksi SILPA tahun lalu	Rp. (60.119.095,15)
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 (e+f)	Rp. 166.599.842.513,67

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

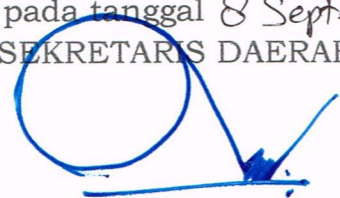
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 15 TAHUN 2025.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid Akuntansi & Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

OPD	Tagihan Jangka Panjang	Tuntutan Ganti Rugi	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain - Lain	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Jumlah
dididikan	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861,854,964.52	0.00	5,861,854,964.52
sehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878,887,151.14	0.00	3,878,887,151.14
ota Mataram	0.00	0.00	0.00	3,245,292,000.00	4,182,710,000.00	(3,223,477,167.00)	4,204,524,833.00
dan Penataan	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966,031,600.70	0.00	2,966,031,600.70
umahan dan Pemukiman	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,907,409.00	0.00	2,141,907,409.00
polisi Pamong	0.00	0.00	0.00	0.00	385,980,500.00	0.00	385,980,500.00
nam	0.00	0.00	0.00	0.00	186,957,000.00	0.00	186,957,000.00
anggulangan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	86,205,000.00	0.00	86,205,000.00
ial	0.00	0.00	0.00	0.00	242,021,125.00	0.00	242,021,125.00
aga Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775,000.00	0.00	50,775,000.00
berdayaan n dan gan Anak	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900,000.00	0.00	24,900,000.00
alahan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00	395,946,581.70	0.00	395,946,581.70
ngkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,855,382.00	0.00	3,370,855,382.00
pendudukan dan n Sipil	0.00	0.00	0.00	36,250,000.00	2,008,658,360.00	(33,500,000.00)	2,011,408,360.00
ngendalian dan KB	0.00	0.00	0.00	0.00	348,148,090.00	-	348,148,090.00

OPD	Tagihan Jangka Panjang	Tuntutan Ganti Rugi	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain - Lain	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Jumlah
hubungan	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	438,337,525.00	(49,500,000.00)	438,337,525.00
munikasi dan	0.00	0.00	0.00	0.00	788,275,496.17	-	788,275,496.17
industrian, Usaha Kecil dan	0.00	0.00	0.00	64,845,000.00	12,900,000.00	(41,068,500.00)	36,676,500.00
anaman Modal anan Terpadu	0.00	0.00	0.00	313,114,000.00	299,372,000.00	(313,114,000.00)	299,372,000.00
emudaan dan	0.00	0.00	0.00	0.00	65,478,940.30	-	65,478,940.30
rsipan dan an	0.00	0.00	0.00	0.00	543,779,436.00	-	543,779,436.00
kanan	0.00	0.00	0.00	0.00	671,068,827.20	-	671,068,827.20
wisata	0.00	0.00	0.00	288,686,400.00	209,729,500.00	(253,873,893.00)	244,542,007.00
anian	0.00	0.00	0.00	0.00	336,205,410.84	-	336,205,410.84
lagangan	0.00	0.00	0.00	116146000.00	407,232,075.00	(76,979,333.00)	446,398,742.00
Daerah			231,128,730,000.00	182,734,000.00	7,318,396,697.98	(166,734,000.00)	238,463,126,697.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,821,603.00	-	1,227,821,603.00
A	0.00	0.00	0.00	241,670,000.00	290,309,000.00	(204,226,000.00)	327,753,000.00

OPD	Tagihan Jangka Panjang	Tuntutan Ganti Rugi	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain - Lain	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Jumlah
Daerah	5,879,601,277.30	0.00	0.00	516,056,500.00	952,640,455.00	(180,804,742.00)	7,167,493,490.30
pegawaian dan SDM	0.00	0.00	0.00		98,779,000.00	-	98,779,000.00
Daerah	0.00	0.00	0.00		283,196,900.00	-	283,196,900.00
Daerah	0.00	0.00	0.00		247,591,909.00	-	247,591,909.00
n Cakranegara	0.00	0.00	0.00	0.00	174,261,090.91	0.00	174,261,090.91
n Sandubaya	0.00	0.00	0.00	0.00	235,513,500.00	0.00	235,513,500.00
n Mataram	0.00	0.00	0.00	0.00	777,421,046.36	0.00	777,421,046.36
n Selaparang	0.00	0.00	0.00	25,102,900.00	72,625,270.00	(25,102,900.00)	72,625,270.00
n Ampenan	0.00	0.00	0.00		1,578,426,321.91	0.00	1,578,426,321.91
n Sekarbela	0.00	0.00	0.00		276,943,600.00	0.00	276,943,600.00
Spol	0.00	0.00	0.00		144,743,000.00	-	144,743,000.00
JILAH	5,879,601,277.30	0.00	231,128,730,000.00	5,079,396,800.00	43,582,886,768.73	(4,568,380,535.00)	281,102,234,311.03

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,


H. MOURIN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2024

OPD	ASET TETAP								SALDO AKHIR
	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENCERJAAN	AKUMULASI PENYUSUTAN		
Kendudukan Kesehatan	177,674,034,776.00	123,433,498,096.97	268,602,564,035.06	342,025,137.11	7,637,925,647.54	0.00	(164,992,094,993.18)	412,697,952,699.50	
	24,673,808,000.00	69,888,970,241.41	72,913,553,540.00	1,651,113,250.00	6,987,500.00	535,616,500.00	(67,798,321,308.48)	101,871,727,522.93	
Kota Mataram	32,970,523,808.00	518,910,658,302.19	215,408,675,705.07	16,187,319,601.00	240,187,000.00	0.00	(377,479,457,800.94)	406,237,906,615.32	
	111,040,159,284.00	16,467,454,262.46	92,208,470,928.29	960,150,735,601.05	1,015,610,000.00	0.00	(711,180,777,201.91)	469,701,652,873.89	
Kerumahan dan n Pemukiman	271,004,174,218.00	6,961,315,860.97	56,969,374,347.00	297,948,754,024.50	993,524,780.00	208,373,000	(94,833,390,382.99)	539,252,125,847.48	
	0.00	4,544,457,112.44	2,517,752,000.00	15,503,000.00	311,730,000.00	0.00	(4,044,536,513.08)	3,344,905,599.36	
Kerumahan an	480,000,000.00	10,491,809,244.43	7,445,147,458.00	753,784,000.00	0.00	0.00	(10,956,260,871.59)	8,214,479,830.84	
	0	3,737,302,150.00	217,882,469.00	198,300,000.00	0.00	0.00	(3,733,599,871.86)	419,884,747.14	
Kerumahan Daerah	0.00	1,869,813,676.00	1,051,106,100.00	140,133,000.00	0.00	0.00	(2,032,803,607.81)	1,028,249,168.19	
	0.00	1,928,592,208.00	917,769,692.00	0.00	0.00	0.00	(1,808,017,017.28)	1,038,344,882.72	
Kerumahan Daerah	0.00	1,524,849,487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,381,795,514.36)	143,053,973.42	
	3,083,916,000.00	1,748,686,761.58	2,042,186,428.90	53,385,500.00	0.00	0.00	(1,922,186,416.41)	5,005,988,274.07	
Kerumahan Hidup	97,710,069,025.00	53,418,645,414.56	25,079,779,536.00	4,462,132,015.00	385,070,767.50	278,493,450.00	(48,400,567,099.66)	132,933,623,108.40	
	0.00	5,667,632,588.00	3,884,728,379.00	33,720,900.00	22,250,000.00	0.00	(5,818,407,603.99)	3,789,924,263.01	
Kerumahan KKB	3,287,229,000.00	8,118,155,645.00	5,392,968,295.00	9,942,000.00	238,892,500.00		(7,401,536,589.29)	9,645,650,850.71	
	334,327,100.00	36,010,424,221.92	5,392,263,850.44	7,207,714,272.00	6,000,000.00		(23,452,796,371.92)	25,497,933,072.44	
Kerumahan KKB	0.00	6,628,091,862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,740,941,266.49)	887,150,595.70	
	0.00	1,908,154,999.00	5,437,717,000.00	199,500,000.00	10,000,000.00	0.00	(1,794,464,789.29)	5,760,907,209.71	

OPD	ASET TETAP							SALDO AKHIR
	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
Manajemen Modal Manajemen Anggaran Terpadu Manajemen	0.00	4,914,393,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,615,062,384.16)	1,299,330,937.34
	4,571,740,000.00	1,375,240,684.70	10,165,239,800.00	0.00	0.00	298,480,000.00	(4,227,359,681.23)	12,183,340,803.47
Kelembagaan dan Kelembagaan	0.00	4,761,607,536.00	14,444,103,901.00	72,839,812.00	1,453,475,822.70	0.00	(4,817,503,633.93)	15,914,523,437.77
Perikanan	465,210,265.00	5,327,477,811.32	12,507,863,137.75	1,226,269,161.00	379,834,700.00	406,799,000.00	(8,043,817,168.36)	12,269,636,906.71
Perawatan	1,772,503,500.00	3,683,351,929.00	37,632,447,501.16	562,304,400.00	194,119,982.00	149,209,000.00	(5,226,088,981.58)	38,767,847,330.58
Pertanian	17,875,184,000.00	5,351,339,840.29	15,550,785,066.13	673,724,500.00	133,015,000.00	0.00	(9,077,256,588.67)	30,506,791,817.75
Perdagangan	50,644,367,300.00	9,621,442,584.00	322,318,356,156.35	1,447,164,000.00	35,759,240.00	297,855,000.00	(100,973,150,527.19)	283,391,793,753.16
Perindustrian	27,524,962,000.00	48,165,204,027.22	55,469,127,105.60	3,093,570,050.00	1,107,596,161.00	0.00	(53,060,027,073.06)	82,300,432,270.76
Perencanaan	0.00	16,674,126,800.73	21,301,272,000.00	74,120,000.00	279,448,000.00	0.00	(16,797,678,863.64)	21,531,287,937.09
Perencanaan	0.00	6,100,067,746.71	0.00	0.00	75,750,000.00	0.00	(4,972,228,397.17)	1,203,589,349.54
Perencanaan	646,086,587,418.99	19,494,653,670.81	5,933,275,417.00	1,769,591,693.00	13,199,800.00	0.00	(16,319,368,482.94)	656,977,939,516.86
Perencanaan dan Perencanaan	0.00	3,459,803,359.00	329,179,000.00	12,925,600.00	0.00	0.00	(2,721,842,744.43)	1,080,065,214.57
Perencanaan dan Perencanaan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Perencanaan	0.00	1,532,106,287.00	0.00	35,970,000.00	0.00	0.00	(1,491,106,780.29)	76,969,506.71

OPD	ASET TETAP							SALDO AKHIR
	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
Provinsi Daerah	48,000,000.00	4,176,411,060.04	4,156,877,867.32	85,851,140.00	34,679,400.00	0.00	(3,761,025,802.80)	4,740,793,664.56
Kabupaten Cakranegara	9,179,262,000.00	7,078,347,502.10	8,750,335,525.00	5,663,002,625.00	81,838,000.00	0.00	(10,518,814,902.37)	20,233,970,749.73
Kabupaten Sandubaya	29,567,384,000.00	5,001,597,468.00	10,182,186,056.00	4,210,288,288.00	22,514,000.00	0.00	(8,634,256,830.41)	40,349,712,981.59
Kabupaten Mataram	18,781,771,000.00	6,755,893,689.65	7,979,816,287.00	2,746,970,400.00	900,000.00	0	(8,147,266,708.69)	28,118,084,667.96
Kabupaten Selaparang	5,512,806,000.00	7,469,848,646.65	8,947,041,387.00	4,130,335,161.92	0.00	0.00	(9,433,461,704.58)	16,626,569,490.99
Kabupaten Ampenan	7,564,928,000.00	5,998,415,871.09	9,018,276,680.00	6,673,136,277.00	0.00	0.00	(10,926,780,777.79)	18,327,976,050.30
Kabupaten Sekarbela	1,670,261,000.00	4,462,788,907.98	7,875,644,421.68	1,995,766,018.00	14,275,000.00	0.00	(6,741,002,222.67)	9,277,733,124.99
Kesatuan Bangsa dan Politik	1,350,000,000.00	1,678,753,561.00	1,612,855,500.00	0.00	0.00	0.00	(1,734,988,238.71)	2,906,620,822.29
JUMLAH	1,544,873,207,694.99	1,046,341,384,439.69	1,319,656,622,572.75	1,323,827,891,426.58	14,694,583,300.74	2,174,825,950.00	-1,826,012,043,915.20	3,425,556,471,469.55

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLSKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
anah	1,332,906,253,110.00	223,097,184,875.99	11,130,230,291.00	1,544,873,207,694.99
eralatan dan Mesin	940,058,935,876.37	117,133,290,964.00	10,850,842,401.18	1,046,341,384,439.19
edung dan Bangunan	1,221,838,466,235.75	99,349,932,337.00	1,531,776,000.00	1,319,656,622,572.75
lan, Jaringan dan Instalasi	1,205,477,427,032.08	119,492,043,344.50	1,141,578,950.00	1,323,827,891,426.58
aset Tetap Lainnya	14,485,603,528.74	1,498,259,309.00	1,289,279,537.00	14,694,583,300.74
onstruksi dalam Pengerjaan	1,340,948,450.00	883,465,500.00	49,588,000.00	2,174,825,950.00
kumulasi Penyusutan	(1,630,116,764,495.49)	(195,895,279,419.71)	0.00	(1,826,012,043,915.20)
JUMLAH	3,085,990,869,737.45	365,558,896,910.78	25,993,295,179.18	3,425,556,471,469.05

Mataram, 8 September 2025

WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

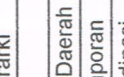
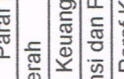
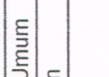


PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN S/D AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN S/D AKHIR TAHUN	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (DEVIDEN) TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN S/D TAHUN INI
2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10	11	12
Kategori Perencanaan										
Kategori Perencanaan Kategori Perencanaan Kategori Perencanaan Kategori Perencanaan	-	aset dan saham	-	155,444,739,192.42	-	155,444,739,192.42	-	9,322,174,672.00	-	155,444,739,192.42
	-	saham	-	27,097,130,000.00	-	27,097,130,000.00	-	5,103,806,038.00	-	27,097,130,000.00
	-	saham	-	4,634,346,000.00	-	4,634,346,000.00	-	479,800,500.00	-	4,634,346,000.00
	-	saham	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	48,321,978.00	-	1,000,000,000.00
JUMLAH				188,176,215,192.42	-	188,176,215,192.42	-	14,954,103,188.00	-	188,176,215,192.42

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN		SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4		5	6	7	8
1								
2								
3								
4	X	X	X		X	X	X	X
5								
6								
7								
JUMLAH								-

Mataram, 8 September 2025

WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Pit. Asisten Administrasi Umum	
Pit. Kepala Bagian Hukum	

H. MUHAMMAD ROLISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
FTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Uraian Kewajiban Jangka Pendek	Jumlah
I	Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)	313,242,927.00
1	Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh Final BUD	313,242,927.00
II	Utang Belanja	91,577,634,416.00
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9,382,274,878.00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	2,192,661,200.00
3	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	156,713,690.00
4	Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Kota Mataram	1,956,036,239.00
5	Utang Belanja Barang	132,670,000.00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa	4,126,537,228.00
7	Utang Belanja Pemeliharaan	254,850.00
8	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kota Mataram	65,578,757,356.00
9	Utang Belanja Modal Tanah Badan Keuangan Daerah	7,298,210,500.00
10	Utang Belanja Modal Tanah Dinal Lingkungan Hidup	75,500,000.00
11	Utang Belanja Modal Gedung Kantor Camat Cakranegara	4,199,000.00
12	Utang Belanja Modal Bagunan Air Dinas PUPR	147,111,000.00
18	Utang Belanja Bantuan keuangan kekurangan pembayaran Iuran KJP dan KDN TPA Kebon Kongok Bagian Bulan Desember 2024	526,708,475.00
III	Pendapatan Diterima Dimuka	26,666,667.00
1	Pendapatan Diterima Dimuka BLUD RSUD merupakan sewa lahan ATM	26,666,667.00
JUMLAH		91,917,544,010.00

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

H. MOHAN ROLISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Uraian Kewajiban Jangka Panjang	Jumlah
1	NIHIL	0.00
JUMLAH		0.00

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

H. MOHAN ROLISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN (DPA-L) SAMPAI AKHIR TAHUN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JRAIAN RINCIAN KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN N-1, TAHUN N-2 DAN TAHUN INI			JUMLAH AKUMULASI S/D TAHUN N	JUMLAH YANG AKAN DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-2	REALISASI TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	X	X	X	X	X	X
							-
	JUMLAH		-	-	-	-	-

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	OPD	KDP
1	Dinas Kesehatan	535,616,500.00
2	Dinas Pemuda dan Olah Raga	298,480,000.00
3	Dinas Perikanan	406,799,000.00
4	Dinas Lingkungan Hidup	278,493,450.00
5	Dinas Perkim	208,373,000
6	Dinas Pariwisata	149,209,000.00
7	Dinas Perdagangan	297,855,000.00
JUMLAH		2,174,825,950.00

Mataram, 8 September 2025

WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

H. MOHAN ROLISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4		5
1	Investasi Non Permanen	61,789,188.00	-	20,441,545.00	41,347,643.00
	Jumlah	61,789,188.00	-	20,441,545.00	41,347,643.00

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

H. MOHAN KULISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	PIUTANG	PENYISIHAN	PIUTANG NRV
1	2	3	4	5
1	Piutang pajak	41,755,647,635.42	(12,880,010,065.53)	28,875,637,569.89
2	Piutang Retribusi	2,930,353,641.00	(548,146,041.70)	2,382,207,599.30
3	Piutang Lainnya	39,222,062,843.25	(13,789,979,200.35)	25,432,083,642.90
	Jumlah	83,908,064,119.67	(27,218,135,307.58)	56,689,928,812.09

Mataram, 8 September 2025
WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	

H. MOHAN ROLISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
I	Piutang Pajak		42,205,053,714.31	2,817,535,262.00	6,834,673,653.65	41,755,647,635.42
1	Piutang Pajak Hotel	S/D Tahun 2024	3,087,159,868.09	0.00	3,087,159,868.09	-
2	Piutang Pajak Restoran	S/D Tahun 2024	3,039,783,902.76	0.00	3,039,783,902.76	-
3	Piutang Pajak Hiburan	S/D Tahun 2024	197,201,375.00	-	197,201,375.00	-
4	Piutang Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	S/D Tahun 2024	956,551,248.46	-	18,756,021.80	937,795,226.66
5	Piutang Pajak PBB-P2	S/D Tahun 2024	34,166,845,180.00	2,557,799,732.00	0.00	36,724,644,912.00
6	Piutang Pajak Reklame	S/D Tahun 2024	265,739,654.00	259,735,530.00	-	525,475,184.00
7	Piutang Pajak Parkir	S/D Tahun 2024	491,772,486.00	-	491,772,486.00	-
8	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Tahun 2024	-	3,567,732,312.76	-	3,567,732,312.76
II	Piutang Retribusi	S/D Tahun 2024	2,324,564,517.00	1,016,366,152.00	410,577,028.00	2,930,353,641.00
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan	S/D Tahun 2024	1,729,345,100.00	395,654,800.00	-	2,124,999,900.00
2	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang Yang Dikontrakan	Tahun 2024	-	100,395,000.00	-	100,395,000.00
3	Piutang Retribusi IMB	S/D Tahun 2024	1,208,167.00	-	-	1,208,167.00
4	Piutang Retribusi PIMB	S/D Tahun 2024	-	-	0.00	-
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	S/D Tahun 2024	-	-	0.00	-
6	Piutang Retribusi Izin Trayek	S/D Tahun 2024	-	-	-	-
7	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	S/D Tahun 2024	-	-	-	-
8	Piutang Pelayanan Kesehatan	S/D Tahun 2024	-	-	-	-
9	Piutang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	S/D Tahun 2024	64,318,060.00	-	49,202,028.00	15,116,032.00
10	Piutang Retribusi Parkir Diluar Badan Jalan	Tahun 2024	-	64,566,000.00	-	64,566,000.00
11	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	S/D Tahun 2024	168,318,190.00	93,625,352.00	-	261,943,542.00
12	Piutang Pelayanan Kebersihan	S/D Tahun 2024	361,375,000.00	362,125,000.00	361,375,000.00	362,125,000.00
III	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	S/D Tahun 2024	5,631,928,516.00	-	5,631,928,516.00	-
IV	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	S/D Tahun 2024	20,443,700,340.70	18,779,442,730.00	1,080,227.45	39,222,062,843.25
1	Piutang Pendapatan Pasien Umum, Klaim Askes dan Jamkesmas RSUD Kota Mataram, dan Parkir (BLUD)	S/D Tahun 2024	20,442,620,113.25	18,779,442,730.00	-	39,222,062,843.25
2	Piutang Jasa Giro	S/D Tahun 2024	155,863.45	0.00	155,863.45	-
3	Piutang Denda Pajak Hiburan dan Hotel Tahun 2019	S/D Tahun 2024	924,364.00	0.00	924,364.00	-
V	Piutang Transfer Dana Perimbangan	S/D Tahun 2024	13,912,124,505.00	-	5,125,092,000.00	8,787,032,505.00
VI	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	S/D Tahun 2024	13,482,886,163.00	-	4,778,973,750.00	8,703,912,413.00
IV	Piutang Lainnya	S/D Tahun 2024	54,547,029,889.00	-	54,547,029,889.00	-
1	Piutang Bagian lancar TGR	S/D Tahun 2024	471,145,000.00	0.00	471,145,000.00	-
2	Piutang Lain-lain (lainnya) PT AMAN MINERAL	S/D Tahun 2024	54,075,884,889.00	0.00	54,075,884,889.00	-
	JUMLAH		92,368,329,240.01	22,613,344,144.00	17,150,396,659.10	101,399,009,037.67

Mataram, 8 September 2025

WALI KOTA MATARAM,

H.MOHAN ROMISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Bagian Hukum	